Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X **(Printed)**
6 (2) 2025, Page: 24963-24970

Dampak Politik Uang Terhadap Pemilih Pemula dalam Pilkada Serentak Tahun 2024

(Studi Kasus Desa Tenggaro, Kecamatan Keluang, Kabupaten Musi Banyuasin)

Abdullah[1], Komaruddin[2], Hatta Azzuhri [3]
Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Email Korespodensi: abdulmuziyah157@gmail.com, komaruddin_uin@radenfatah.ac.id, hattaazzuhri_uin@radenfatah.ac.id

Published: April 2026

ABSTRACT

This study aims to analyze the impact of money politics on first-time voters in the 2024 Simultaneous Regional Elections in Tenggaro Village using Milbrath's voter behavior theory. The phenomenon of money politics remains a serious problem in the democratic process at the local level, particularly in rural areas with relatively low socioeconomic conditions. The research method used was a descriptive qualitative approach, with data collection techniques through in-depth interviews, observation, and documentation. The results indicate that money politics still occurs and influences the behavior of first-time voters in Tenggaro Village. Some first-time voters accept money politics due to economic factors and view it as a form of assistance or fortune. Furthermore, their voting decisions are also influenced by family factors, social environment, and low political understanding. Based on Milbrath's theory, it was found that personal and social factors, environmental, psychological, and situational factors play a role in shaping the behavior of first-time voters. The impacts of money politics on first-time voters include decreased political awareness, the development of pragmatic voting behavior, and a weakening of the quality of democracy at the local level.

Keywords: *Money politics, first-time voters, voter behavior, Regional Elections*

ABSTARK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak politik uang terhadap pemilih pemula dalam Pilkada Serentak Tahun 2024 di Desa Tenggaro dengan menggunakan pendekatan teori perilaku pemilih menurut Milbrath. Fenomena politik uang masih menjadi permasalahan serius dalam proses demokrasi di tingkat lokal, khususnya di wilayah pedesaan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang relatif rendah. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik uang masih terjadi dan memberikan pengaruh terhadap perilaku pemilih pemula di Desa Tenggaro. Sebagian pemilih pemula menerima politik uang karena faktor ekonomi dan menganggapnya sebagai bentuk bantuan atau rezeki. Selain itu, keputusan memilih juga dipengaruhi oleh faktor keluarga, lingkungan sosial, serta rendahnya pemahaman politik. Berdasarkan teori Milbrath, ditemukan bahwa faktor pribadi dan sosial, lingkungan, psikologis, serta situasional berperan dalam membentuk perilaku pemilih pemula. Dampak politik uang terhadap pemilih pemula antara lain menurunnya kesadaran politik, terbentuknya perilaku memilih yang pragmatis, serta melemahnya kualitas demokrasi di tingkat lokal.

Kata Kunci: *Politik uang, pemilih pemula, perilaku pemilih, Pilkada*

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Pilkada atau Pemilihan Kepala Daerah adalah salah satu proses demokrasi yang penting di Indonesia. Pemilu lokal ini memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memilih pemimpin daerah yang dianggap paling sesuai dengan aspirasi mereka. Namun, meskipun Pilkada dimaksudkan untuk memperkuat demokrasi, masalah politik uang masih menjadi tantangan besar, terutama di kalangan pemilih pemula, khususnya Generasi Z. Generasi ini, yang umumnya berusia antara 18 hingga 24 tahun, telah menunjukkan ketertarikan yang tinggi dalam dunia politik, namun banyak yang masih

belum sepenuhnya memahami dampak dari politik uang dalam proses pemilihan umum (Silitonga & Roring, 2023).

Generasi Z dikenal sebagai generasi yang sangat terhubung dengan teknologi dan informasi. Menurut (Choeriyah & Assyahri, 2024), generasi ini cenderung mengakses informasi dengan cepat melalui media sosial, yang dapat mempengaruhi pandangan mereka terhadap proses demokrasi. Namun, banyak juga di antara mereka yang merasa cemas dan tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentang bagai mana memilih kandidat yang tepat tanpa pengaruh materi, seperti uang. Fenomena ini menjadi penting untuk diteliti karena dapat berpengaruh pada kualitas demokrasi di Indonesia, khususnya dalam Pilkada yang berpotensi terganggu oleh praktik politik uang.

Politik uang atau pemberian uang untuk memengaruhi pilihan pemilih sudah menjadi masalah yang kerap kali ditemukan dalam pemilihan umum di Indonesia. Praktik politik uang sering kali dianggap sebagai cara yang mudah untuk memenangkan kontestasi politik, meskipun secara etis sangat merusak (Padilah & Irwansyah, 2023). Bagi pemilih yang belum berpengalaman, terutama pemilih pemula seperti Generasi Z., tawaran uang untuk memilih seorang calon kepala daerah mungkin terasa menarik, terutama jika mereka memiliki keterbatasan informasi atau akses ke pendidikan politik yang memadai.

Tidak bisa dipungkiri bahwa pilkada serentak 2024 juga terdapat praktik-praktik politik uang. Seperti pada laporan tim Advokasi Lucianty-Syaparuddin menemukan dugaan adanya praktik politik uang selama pilkada serentak berlangsung di dua Desa. Diantaranya adalah Desa Sukarami Kecamatan Sekayu , Desa Lubuk Harjo, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin (suarapos.com, 2024). Dan juga beredar video dugaan politik uang (money politics) yang dilakukan Calon Bupati Musi Banyuasin (Muba) Lucianty. Lucianty yang berpasangan dengan Syaparuddin di Pilkada Muba melakukan saweran saat kampanye di wilayah tersebut. Pemberian uang lembaran Rp 100 ribu dilakukan Ketua Pimda PKN Sumsel kepada para ibu-ibu yang menampilkan hadroh. Seluruhnya diberikan saweran tanpa terkecuali.

Pada Pemilihan Kepala Daerah serentak 27 november 2024, salah satu desa yang melaksanakan pemilihan kepala daerah ialah Desa Tenggaro Kecamatan Keluang. Pada pemilihan Kepala Daerah Musi Banyuasin terdapat 2 calon Kepala Derah, yaitu Lucianty-Syaparuddin dan M Toha-Rohman, pasangan nomor urut 1 adalah Lucianty-Syaparuddin yang diusung oleh sebelas partai politik diantaranya Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dan Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora). Sedangkan paslon nomor 2 adalah M Toha-Rohman yang diusung oleh 3 partai yaitu Partai PKB, partai Nasdem dan Partai Demokrat.

Pemilih pemula merupakan salah satu segmen yang memang menjanjikan secara kuantitas dalam pemilu, seperti halnya dalam kasus kali ini, pada saat beberapa hari dilaksanakannya pilkada pada tanggal 27 November di Kabupaten Musi Banyuasin, banyak para tim sukses menjadikan para pemilih pemula sebagai korban money politics karena dinilai sebagai pemilih yang unik sehingga tidak adanya pengalaman dalam pemilu, karena usia pemilih pemula yang muda hal ini menjadikannya mudah untuk dipengaruhi dengan hal yang menggiurkan seperti contohnya imbalan uang hingga jasa, sudah terhitung dari 52 orang pemilih pemula, 48 orang diantaranya menerima imbalan politik uang dan 4 orang menolak imbalan politik uang.

Diketahui bahwa politik uang yang dilakukan pada Desa Tenggaro dengan memberikan foto copy Kartu Tanda Penduduk/KTP atau Kartu Keluarga kepada para tim sukses sebagai jaminan untuk memilih sesuai dengan nomor urut yang telah disepakati. Pembagian uang secara langsung akan dilakukan oleh tim sukses, diketahui setiap satu Kartu Tanda Penduduk diberikan nominal senilai 100.000 hingga 300.000 per KTP bahkan bisa 1.000.000 atau lebih untuk satu Kartu Keluarga tergantung pada banyak nya jumlah per orang dalam keluarga yang sudah legal atau bisa memberikan suara dalam pemilu.

Para tim sukses menginginkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga sebagai jaminan untuk melihat apakah orang yang menerima money politics akan memilih suara atau

mencoblos sesuai dengan yang telah disepakati, dan akan disesuaikan dengan hasil suara akhir yang telah diumumkan nanti nya.

Pendidikan politik yang efektif dapat membekali generasi muda dengan pengetahuan untuk memilih secara lebih rasional, mengurangi kecenderungan mereka untuk tergoda oleh politik uang, dan pada akhirnya meningkatkan kualitas pemilu (Zairudin dkk., 2023). Oleh karena itu, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi pembuat kebijakan dan praktisi politik untuk merancang strategi edukasi politik yang lebih tepat bagi generasi muda, agar mereka dapat berpartisipasi dalam Pilkada dengan lebih cerdas dan bertanggung jawab.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menganalisis dampak politik uang terhadap pemilih pemula dalam Pilkada Serentak Tahun 2024 di Desa Tenggaro. Pendekatan ini dipilih untuk memahami secara mendalam fenomena sosial yang terjadi di masyarakat, khususnya terkait perilaku pemilih pemula dalam konteks politik lokal.Lokasi penelitian dilakukan di Desa Tenggaro, Kabupaten Musi Banyuasin, dengan waktu penelitian pada bulan September 2025. Informan dalam penelitian ini ditentukan menggunakan teknik purposive sampling, yang terdiri dari pemilih pemula sebagai informan utama, serta tokoh masyarakat dan panitia pemilihan sebagai informan pendukung. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk menggali pandangan dan pengalaman informan terkait praktik politik uang, sedangkan observasi dilakukan untuk melihat kondisi sosial masyarakat secara langsung. Dokumentasi digunakan sebagai data pendukung dalam penelitian. Dalam menganalisis data, penelitian ini menggunakan teori perilaku pemilih menurut Milbrath (dalam Sastroamidjojo, 1995) yang mencakup faktor pribadi dan sosial, faktor lingkungan, faktor psikologis, serta faktor situasional sebagai kerangka analisis dalam memahami perilaku pemilih pemula terhadap praktik politik uang.

.

KESIMPULAN

Dampak Politik Uang Terhadap Pemilih Pemula

Jika dianalisis menggunakan teori perilaku pemilih menurut Milbarth, maka fenomena ini dapat dipahami melalui sejumlah indikator yang mencerminkan bagaimana dampak politik uang dalam perilaku politik masyarakat, termasuk pemilih pemula. Menurut Milbrath yang dikutip dalam Sastroamidjojo (1995:12), perilaku politik seseorang dipengaruhi oleh empat aspek, yaitu:

Pertama Aspek Sosial, Secara sosial, sebagian besar pemilih pemula di Desa Tenggaro berasal dari keluarga petani dan buruh harian, dengan tingkat pendidikan yang bervariasi. Kondisi ekonomi yang belum stabil menjadikan mereka lebih mudah menerima pemberian uang atau barang dari tim sukses kandidat. Dalam konteks politik uang, pemilih pemula yang memiliki kondisi ekonomi terbatas sering kali menjadi sasaran empuk bagi para kandidat atau tim sukses yang menawarkan uang, sembako, atau bantuan lain menjelang pemilu. Hal ini menimbulkan dampak negatif berupa penurunan kesadaran politik, karena orientasi memilih bergeser dari pertimbangan program dan visi calon menjadi sekadar balas jasa terhadap pemberian materi, ini menunjukkan bagaimana aspek lingkungan dan sosial yang dijelaskan oleh Milbrath memengaruhi perilaku politik. Dalam lingkungan masyarakat yang bebas terhadap praktik politik uang, pemilih pemula akan membangun persepsi bahwa tindakan tersebut merupakan hal wajar dan tidak menyalahi norma social yang muncul antara lain adalah menurunnya kesadaran politik masyarakat, karena banyak dampak orang memilih bukan berdasarkan program, visi, atau kinerja calon, tetapi karena pemberian uang atau barang. Selain itu, banyak yang mulai menganggap politik uang sebagai hal yang biasa, sehingga praktik ini terus berulang. Akibatnya, muncul pandangan bahwa pemilu hanya kesempatan untuk mendapatkan uang atau keuntungan sesaat, bukan sebagai cara untuk memilih pemimpin yang benar-benar mampu dan bertanggung jawab.

Kedua Aspek Lingkungan, Milbrath menekankan bahwa lingkungan sosial, seperti keluarga, teman sebaya, dan tokoh masyarakat, berpengaruh kuat terhadap perilaku politik individu. Di Desa

Tenggaro, lingkungan sosial yang masih bebas terhadap praktik politik uang menjadi faktor penting yang memperkuat kecenderungan pemilih pemula untuk menerima uang dari kandidat. Lingkungan sosial Desa Tenggaro memiliki pengaruh besar terhadap pola perilaku politik warganya, dapat diketahui bahwa lingkungan yang bebas terhadap praktik ini menjadikan pemilih pemula tumbuh dalam budaya politik yang transaksional. Mereka mengikuti sikap orang tua dan masyarakat sekitar yang menerima pemberian calon tanpa mempertimbangkan nilai moral atau hukum.
Hal ini memperkuat temuan Milbrath bahwa lingkungan sosial yang mendukung atau menoleransi praktik politik tertentu akan memperkuat perilaku politik serupa pada individu.
Dengan demikian, politik uang di Desa Tenggaro tidak hanya berdampak individual, tetapi juga bersifat kultural, membentuk pola pikir bahwa politik adalah ajang bagi-bagi uang, bukan ruang aspirasi publik.

Ketiga Aspek psikologis, pemilih pemula di Desa Tenggaro menunjukkan minat politik yang rendah dan respon terhadap politik yang lemah. Berdasarkan hasil wawancara, sebagian besar responden tidak memahami secara jelas program kerja atau visi-misi calon kepala daerah. Mereka lebih mengingat kandidat yang memberikan uang atau hadiah menjelang pemilihan. Aspek psikologis ini menunjukkan bahwa politik uang dapat mengubah cara berpikir pemilih pemula. Mereka tidak lagi berpartisipasi dalam politik karena pertimbangan yang rasional atau kesadaran politik, tetapi lebih karena dorongan emosi dan keuntungan materi. Hal ini sejalan dengan pandangan Milbrath yang menyatakan bahwa nilai dan minat politik seseorang sangat memengaruhi tingkat partisipasi politiknya. Adanya politik uang membuat minat politik pemilih bergeser, dari yang semula didasarkan pada nilai dan ideologi, menjadi lebih bersifat praktis dan menguntungkan secara pribadi.
ketika politik uang mempengaruhi cara berpikir pemilih pemula, dampaknya adalah terjadinya perubahan motivasi dalam berpolitik. Mereka ikut memilih bukan karena kesadaran atau keyakinan terhadap calon, tetapi karena adanya imbalan. Hal ini membuat kepercayaan diri mereka terhadap kekuatan suara sendiri menjadi berkurang, karena merasa hasil pemilu sudah ditentukan oleh uang, bukan oleh pilihan rakyat yang jujur. Akibatnya, muncul rasa kecewa dan tidak percaya pada dunia politik, bahkan sebagian menjadi tidak peduli lagi terhadap pemilu maupun calon pemimpin yang akan dipilih.

Keempat Aspek Situasional, Pilkada serentak tahun 2024 di Desa Tenggaro berlangsung dalam situasi kompetisi politik yang ketat antara dua pasangan calon utama. Kedua kandidat sama-sama mengandalkan jaringan sosial dan kekuatan finansial untuk menarik simpati pemilih. Dalam konteks seperti ini, praktik politik uang menjadi strategi dominan, terutama menjelang masa tenang pemilu. Seperti dalam wawancara bersama responden pemilih pemula NR yang mengaku didatangi dua timses calon kepala daerah, mengaku mendapatkan uang dari dua calon kepala daerah karena NR membutuhkan untuk keperluan pribadi, ituasi ini menunjukkan bagaimana faktor situasional, seperti ketatnya persaingan, lemahnya pengawasan, dan kebutuhan ekonomi masyarakat memperkuat praktik politik uang.

Menurut Milbrath, kondisi sosial-politik yang tidak stabil atau kompetitif sering kali menurunkan kualitas partisipasi politik karena keputusan pemilih tidak lagi dilandasi pertimbangan rasional, melainkan karena tekanan situasional. Hal ini berdampak pada meningkatnya partisipasi semu, yaitu pemilih memang datang ke tempat pemungutan suara (TPS), tetapi bukan karena kesadaran untuk ikut membangun demokrasi, melainkan karena ingin mendapatkan uang. Akibatnya, nilai kejujuran dan tanggung jawab dalam berpolitik menjadi menurun, karena banyak orang memilih bukanberdasarkan keyakinan terhadap calon, tetapi karena imbalan yang diterima Hal ini juga membuat hasil pemilu menjadi kurang dipercaya, sebab suara yang diberikan bukan karena pilihan yang benar-benar dipikirkan, melainkan karena adanya pemberian uang atau barang

Berdasarkan hasil penelitian dan temuan lapangan yang diperoleh melalui wawancara dengan pemilih pemula dan tokoh masyarakat di Desa Tenggaro, dapat disimpulkan bahwa politik uang sangat memengaruhi perilaku pemilih pemula pada Pilkada Serentak tahun 2024. Kondisi ekonomi yang belum stabil membuat pemilih pemula mudah menerima uang atau barang dari tim sukses calon. Hal ini diperkuat oleh lingkungan sosial yang menganggap politik uang sebagai hal biasa dan sudah menjadi kebiasaan setiap pemilu. Selain itu, pemilih pemula juga memiliki pengetahuan dan minat

politik yang rendah, sehingga mereka tidak memahami visi, misi, dan program calon, serta lebih memilih kandidat yang memberi uang atau bantuan. Situasi politik yang ketat dan lemahnya pengawasan semakin mendorong maraknya praktik politik uang.

Dampak dari politik uang ini sangat merugikan. Kesadaran politik pemilih pemula menjadi menurun karena mereka memilih bukan berdasarkan pertimbangan yang matang. Politik uang juga membuat pemilih bersikap permisif dan menganggap praktik ini wajar, sehingga terus berulang. Partisipasi politik yang terjadi hanya bersifat formal, karena pemilih datang ke TPS bukan karena kesadaran demokrasi, tetapi karena imbalan yang diterima. Akibatnya, kejujuran dan kualitas pemilu menurun, kepercayaan terhadap proses dan hasil pemilu melemah, serta pemilu dipandang hanya sebagai ajang mencari keuntungan sesaat, bukan sebagai cara memilih pemimpin yang baik dan bertanggung jawab.

Sudut Pandang Pemilih Pemula Terhadap Politik Uang

Pemilihan kepala daerah pada dasarnya dipahami oleh masyarakat sebagai sarana demokratis untuk memilih pemimpin yang dianggap mampu membawa perubahan melalui visi, misi, serta program kerja yang ditawarkan. Namun, dari sudut pandang pemilih pemula di Desa Tenggaro, proses demokrasi tersebut tidak selalu berjalan ideal. Dalam praktiknya, mereka masih melihat adanya fenomena politik uang yang dianggap sebagai bagian dari dinamika politik lokal. Kondisi ini menunjukkan bahwa kualitas demokrasi di tingkat lokal masih menghadapi berbagai tantangan, terutama di wilayah pedesaan yang secara sosial dan ekonomi masih rentan terhadap praktik-praktik transaksional.

Bagi sebagian pemilih pemula, proses kampanye yang dilakukan oleh para kandidat kepala daerah sebenarnya memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengenal lebih dekat calon pemimpin mereka. Kandidat sering melakukan kunjungan ke berbagai kelompok masyarakat, seperti kelompok tani, pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM), tokoh masyarakat, tokoh agama, serta organisasi perempuan. Selain itu, para kandidat juga aktif memanfaatkan media digital seperti Facebook, Instagram, dan TikTok untuk memperkenalkan diri kepada masyarakat, termasuk pemilih muda. Melalui media tersebut, mereka menampilkan profil pribadi, pengalaman pemerintahan, serta berbagai program unggulan seperti pemberdayaan ekonomi perempuan, pengembangan sektor pertanian, dan upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih.

Dari perspektif pemilih pemula, kegiatan kampanye tersebut pada dasarnya bertujuan untuk membangun kedekatan dengan masyarakat serta memperkenalkan program kerja yang akan dilaksanakan jika kandidat tersebut terpilih. Namun demikian, tidak semua strategi kampanye dipandang berjalan secara ideal. Beberapa pemilih pemula mengakui bahwa dalam praktiknya masih terdapat kegiatan yang mengarah pada politik uang, seperti pemberian uang tunai atau sembako kepada masyarakat menjelang pemilihan. Fenomena ini membuat sebagian pemilih pemula melihat bahwa proses pemilihan tidak hanya dipengaruhi oleh program atau visi calon, tetapi juga oleh faktor materi yang diberikan kepada masyarakat

Dalam pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024 di Desa Tenggaro, secara resmi panitia pemilihan menyatakan bahwa proses pemilihan berjalan aman dan kondusif. Tidak terdapat laporan resmi dari masyarakat terkait praktik politik uang selama tahapan pemilihan berlangsung. Panitia pemilihan juga menyampaikan bahwa mereka telah menjalankan tugas pengawasan dengan baik, mulai dari tahap pendaftaran hingga penyampaian hasil perhitungan suara. Meskipun demikian, dari sudut pandang pemilih pemula, praktik politik uang masih dipersepsikan sebagai sesuatu yang mungkin terjadi di masyarakat, meskipun tidak selalu dilaporkan secara resmi kepada panitia atau lembaga pengawas pemilu.

Selain berbagai alasan yang memengaruhi keputusan memilih, pemilih pemula di Desa Tenggaro juga memiliki pandangan yang beragam mengenai praktik politik uang yang terjadi pada Pilkada Serentak Tahun 2024. Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti, diketahui bahwa sebagian pemilih pemula menyadari bahwa politik uang merupakan praktik yang tidak sesuai dengan nilai demokrasi, namun dalam kenyataannya masih banyak masyarakat yang menerima pemberian tersebut karena berbagai alasan, terutama faktor ekonomi.

Beberapa pemilih pemula menyatakan bahwa praktik politik uang sudah menjadi fenomena yang sering terjadi menjelang pemilihan umum, sehingga sebagian masyarakat menganggapnya sebagai hal yang biasa. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh pemilih pemula berinisial RD yang menyatakan uang itu tidak baik, tapi di masyarakat sering terjadi jadi Sebagian orang menganggap itu hal biasa, pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemilih pemula memiliki kesadaran bahwa politik uang bukanlah praktik yang ideal dalam demokrasi, namun kebiasaan yang sudah berlangsung lama membuat sebagian masyarakat cenderung menormalisasi praktik tersebut, Selain itu, terdapat pula pemilih pemula yang memandang bahwa pemberian uang oleh kandidat lebih dianggap sebagai bantuan atau bentuk perhatian kepada masyarakat. pandangan tersebut menunjukkan bahwa kondisi ekonomi masyarakat memiliki pengaruh besar terhadap cara masyarakat memaknai praktik politik uang. Dalam situasi ekonomi yang terbatas, pemberian uang sering kali dipersepsikan sebagai bentuk kepedulian kandidat terhadap masyarakat, meskipun sebenarnya praktik tersebut memiliki konsekuensi terhadap kualitas demokrasi. di sisi lain, terdapat pula pemilih pemula yang memiliki pandangan lebih kritis terhadap praktik politik uang. Mereka berpendapat bahwa politik uang dapat merusak proses demokrasi karena pilihan masyarakat tidak lagi didasarkan pada program kerja atau kualitas kandidat, beberapa pemilih pemula juga menilai bahwa praktik politik uang dapat membuat masyarakat menjadi terbiasa menerima imbalan dalam setiap pemilihan.

Dari berbagai pandangan pemilih pemula di Desa Tenggaro persepsi mereka terhadap politik uang masih beragam. Sebagian memandangnya sebagai hal yang tidak baik namun sulit dihindari, sebagian lainnya menganggapnya sebagai bantuan ekonomi, sementara sebagian kecil mulai menyadari dampak negatif politik uang terhadap proses demokrasi.

Perbedaan sudut pandang jugamenunjukkan bahwa tingkat pemahaman dan kesadaran politik pemilih pemula di Desa Tenggaro masih bervariasi. Oleh karena itu, peningkatan pendidikan politik dan sosialisasi mengenai bahaya politik uang menjadi sangat penting agar pemilih pemula dapat menggunakan hak pilihnya secara lebih rasional dan sesuai dengan prinsip demokrasi yang jujur dan adil.

Pada saat menjelang pemilihan kepala desa tidak adanya sosialisasi mengenai pemahaman larangan kampanye menggunakan politik uang menjadikan masyarakat mudah menerima apa yang diberikan kandidat sebagai perantara dalam menggunakan hak pilih. Hal ini menjadikan pemahaman masyarakat mengenai pendidikan politik sangat kurang menjadikan masyarakat mudah terpengaruh akan adanya politik uang yang terjadi pada masa menjelang pemilihan umum terutama Pilkada.

Faktor yang menjadikan praktik politik uang terjadi pada Pilkada serentak tahun 2024 didorong karena dua faktor utama. Pertama, faktor ekonomi karena mayoritas dan sebagian bekerja sebagai petani karet dan juga kurangnya pendapatan sehingga masyarakat merasa harus menerima money politics, kondisi ekonomi yang rentan hingga rendahnya tingkat pendidikan, serta lemahnya kesadaran akan budaya politik saling berhubungan dan bersama-sama membentuk pola yang membuat masyarakat cenderung menerima praktik politik transaksional tersebut, bagi banyak warga, pemberian uang atau barang dari calon dan tim sukses dianggap sebagai "rezeki tambahan" yang dapat langsung dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Karena itu, faktor ekonomi menjadi alasan yang paling dominan dalam menjelaskan mengapa praktik politik uang diterima secara luas. Dalam perspektif pendekatan rasional, keputusan menerima politik uang dipandang sebagai pilihan logis yang lebih menguntungkan dalam jangka pendek, dibandingkan menunggu janji program pembangunan yang belum tentu terealisasi. Kedua, kurangnya pemahaman politik menyebabkan para pemilih pemula dan masyarakat mudah terpengaruh dalam menerima money politics pada Pilkada, tingkat pendidikan masyarakat menjadi faktor yang berperan penting dalam menentukan bagaimana praktik politik uang diterima dan memengaruhi perilaku pemilih pemula dan masyarakat. Kondisi ini mencerminkan bahwa sebagian besar warga masih menghadapi keterbatasan dalam menempuh pendidikan formal, khususnya pada jenjang yang lebih tinggi. Rendahnya akses pendidikan tersebut berimplikasi pada cara pandang dan pola pikir masyarakat ketika mengambil keputusan politik, termasuk dalam merespons tawaran politik uang. Secara umum, tingkat pendidikan pemilih pemula dan masyarakat Desa Tenggaro masih tergolong rendah, sehingga berdampak pada lemahnya kesadaran kritis dalam proses pemilihan. Dari total 1041 penduduk yang telah menjadi pemilih tetap,

hanya 63 orang yang berhasil menempuh pendidikan tinggi, sementara sebagian besar masih berada pada jenjang pendidikan dasar hingga menengah. Jumlah lulusan SD tercatat sebanyak 297 orang, lulusan SMP 141 orang, dan lulusan SMA 290 orang. Dominasi kelompok dengan tingkat pendidikan rendah tersebut memperlihatkan bahwa kapasitas literasi politik masyarakat belum merata di seluruh lapisan.

Kondisi ini berimplikasi langsung terhadap rendahnya kesadaran politik pemilih pemula dan juga warga. Terbatasnya akses pendidikan membuat masyarakat lebih mudah dipengaruhi oleh praktik politik uang serta kurang kritis dalam mengevaluasi visi dan misi calon kepala daerah. Akibatnya, faktor rendahnya pendidikan menjadi salah satu alasan utama mengapa politik uang masih diterima secara luas di Desa Tenggaro. Minimnya pemahaman politik juga menyebabkan praktik tersebut dianggap sebagai sesuatu yang wajar. Dengan demikian, rendahnya tingkat pendidikan politik pemilih pemula dan masyarakat membuat kesadaran memilih lebih mudah diarahkan pada kepentingan jangka pendek dibandingkan pada pertimbangan rasional mengenai program dan kualitas calon.

Budaya politik yang berkembang di masyarakat Desa Tenggaro turut menjadi salah satu alasan mengapa praktik politik uang masih diterima dengan mudah. Sebagian warga memandang pemberian uang atau sembako menjelang pemilu sebagai hal yang biasa dan bahkan telah menjadi tradisi yang diwariskan dari satu periode pemilihan ke periode berikutnya. Dalam perspektif masyarakat, pemilu tidak hanya dimaknai sebagai proses memilih pemimpin, tetapi juga sebagai momentum memperoleh perhatian dalam bentuk bantuan materi. Rendahnya kesadaran politik ini tampak tidak hanya pada pemilihan kepala daerah, tetapi juga dalam pemilihan kepala desa maupun pemilihan lain di tingkat lokal.

Kondisi tersebut menggambarkan bahwa budaya politik masyarakat desa masih berada pada tahap parokial, yaitu ketika keterlibatan dalam politik dianggap tidak terlalu penting, dan partisipasi lebih sering dipahami sebatas formalitas. Bagi sebagian warga dan pemilih pemula, hadir di TPS hanyalah rutinitas, tanpa disertai kesadaran penuh mengenai arti penting suara yang diberikan. Akibatnya, yang terbentuk bukan budaya politik partisipatif, melainkan budaya pasif yang minim pemaknaan terhadap proses demokrasi.

SIMPULAN

Penelitian mengenai dampak politik uang terhadap pemilih pemula dalam Pilkada Serentak Tahun 2024 di Desa Tenggaro, dapat disimpulkan bahwa praktik politik uang masih menjadi fenomena yang cukup kuat dan berpengaruh dalam menentukan perilaku pemilih, khususnya di kalangan pemilih pemula dari sudut pandang pemilih pemula, politik uang dipersepsikan secara beragam. Sebagian menganggap praktik tersebut sebagai hal yang tidak sesuai dengan nilai demokrasi, namun tetap menerimanya karena telah menjadi kebiasaan di masyarakat. Sebagian lainnya memandang politik uang sebagai bentuk bantuan ekonomi atau "rezeki" yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, terutama dalam kondisi ekonomi yang terbatas. Di sisi lain, terdapat pula pemilih pemula yang memiliki kesadaran politik lebih baik dan menilai bahwa politik uang dapat merusak kualitas demokrasi serta menghasilkan pemimpin yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat, keputusan pemilih pemula dalam menentukan pilihan juga dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti pengaruh keluarga, kondisi ekonomi, tingkat pemahaman politik, serta lingkungan sosial. Sebagian pemilih pemula memilih berdasarkan arahan orang tua, sebagian karena adanya pemberian uang dari kandidat, sebagian berdasarkan pertimbangan visi dan misi, dan sebagian lainnya memilih secara acak karena kurangnya pengetahuan politik.

DAFTAR PUSTAKA

Adhinata, B. (2019). *Vote Buying dan Perilaku Pemilih Pemula: Kasus Pemilihan Gubernur Bali 2018 di Tabanan*. Politika: Jurnal Ilmu Politik,

Agus Riyanto, S. S. (2021). Fenomena Politik Uang . Jawa Tengah: Bawaslu Jateng.

Aziz, N. M. (2009). Laporan Akhir Pengkajian Hukum. Tentang Pemilihan Kepala Daerah. Jakrata: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kemenkumham RI

Budiarjo, Miriam (2009). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama

Clara K. Monintja, M. T. (2022). *FAKTOR-FAKTOR PELANGGARAN POLITIK UANG BAGI*

PEMILIH PEMULA DI KABUPATEN MINAHASA SELATAN. Jurnal Ilmu Politik, 1.

Efriza (2012). *Sebuah Kajian Ilmu Politik*. Bandung: Alfabeta

Fitriyah. *Cara Kerja Politik Uang (Studi Kasus Pilkada dan Pilkades di Kabupaten Pati*. Jurnal. Politika. Vol. 6, No,2, 2015

Fitriyah.*"Cara Kerja Politik Uang (Studi Kasus Pilkada dan Pilkades di Kabupaten Pati)"*. Jurnal Politika. Vol. 6, No. 2,2015.

Gaftar, J (2012) Politik Hukum Pemilu. Konstitusi Press. Jakarta: Konstitusi Press.

Harrison, Lisa (2009). Metodologi Penelitian Politik. Jakarta: Kencana

Hawing Hardianto, F. N. (2020). *Pengaruh Politik Uang Terhadap Partisipasi Pemilih Pemula Pemilukada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wajo Tahun 2018*. Social Politics and Governance, 1.

Heni, Y. (2020). *POLITIK UANG DAN PEMILIH PEMULA*. Ilmu Politik dan Ilmu Sosial, 1.

Herdiansyah, Haris (2012). *Metedeologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Selemba Humanika.

Ismawan, Indra (1999). Money Politic: Pengaruh Uang dalam PEMILU. Yogyakarta: Media Persindo.

IZZA, I. L. (2016). *PENGARUH MONEY POLITCS TERHADAP PEMILIH PEMULA DALAM PIMILIHAN KEPALA DESA SIDOMUKTI KECAMATAN MAGOYOSO KABUPATEN PATI TAHUN 2015*. Governance Science, 1.

Kamuli, S., Latare, S., & Sahi, Y. (2023). *Implikasi Konflik Partai Politik terhadap Paradigma Pemilih Pemula Menjelang Pemilu 2024*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah.

Marijan, K. (2010). Sistem Politik Indonesia. Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Moch Edward Trias Pahlevi, A. A. (2015). Pendidikan Politik Indonesia Dalam Pencegahan Politik Uang Melalui Gerakan Masyarakat Desa. Jurnal INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi (Vol. 6, No. 1, Juni 2020).

Muhtadi, Burhan (2021). *Kuasa Uang: Politik Uang Dalam Pemilu Pasca-Orde Baru*. Jakarta: Gramedia.

Mustopa, F & Sarip. *Fenomena Politik Uang (Money Politics) Pada Pemilu Tahun 2019 Di Kabupaten CIamis*. Jurnal De Jure Muhammadiyah Cirebon. Vol 6 No. 1,2022.

Pito. Toni. Efriza. Kemal Fasyah (2006). *Mengenal Teori-teori Politik: Dari Sistem Politik Sampai Korupsi*. Bandung: Nuansa Cendikia

Selasih, E. (2021). *Praktik politik uang dan pengaruh pada perilaku pemilih dipilkada Kabupaten Prubalingga 2020: studi di Kelurahan Bancar*. Skripsi,

Sugiyono (2014). Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D. Bandung: Alfabeta

Sukmajati, Mada. Edward Aspinall (2015). Politik Uang di Indonesia. Yogyakarta: PolGov.

Surbakti, Ramlan (2010). *Memahami Ilmu Politik,* Jakarta: Gramedia Widiya Sarana

Thahjo, Kumolo (2015) Politik Hukum PILKADA Serentak. Bandung: PT Mirzan Publika.